

**BERANI
NJUR!
HEBAT!**

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMAHAMAN GRATIFIKASI



Komisi Pemberantasan Korupsi





Apa yang Anda pikirkan
tentang INDONESIA?



Potret Wajah Negeriku...



Pantai Terindah



Gas alam kualitas terbaik



Hutan terbaik



Tambang Emas Terbesar



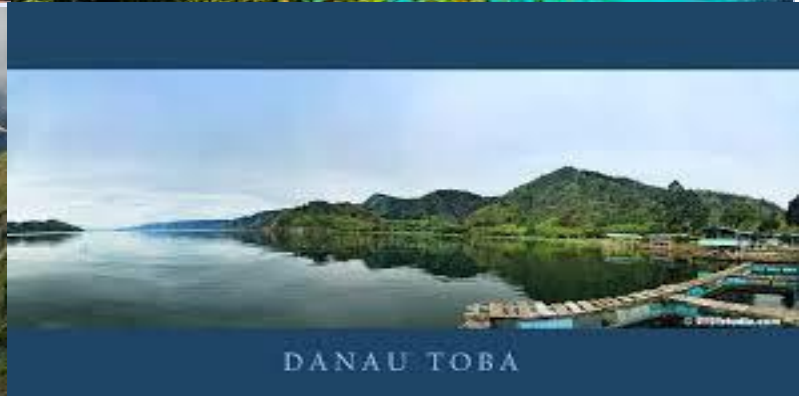
Batu Bara Terbaik

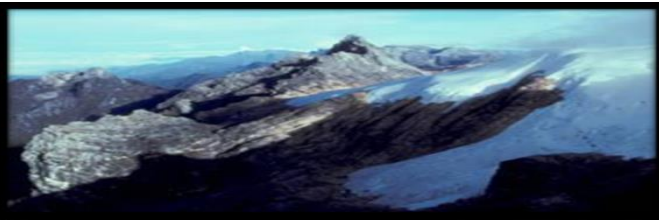


Tanah yang Subur

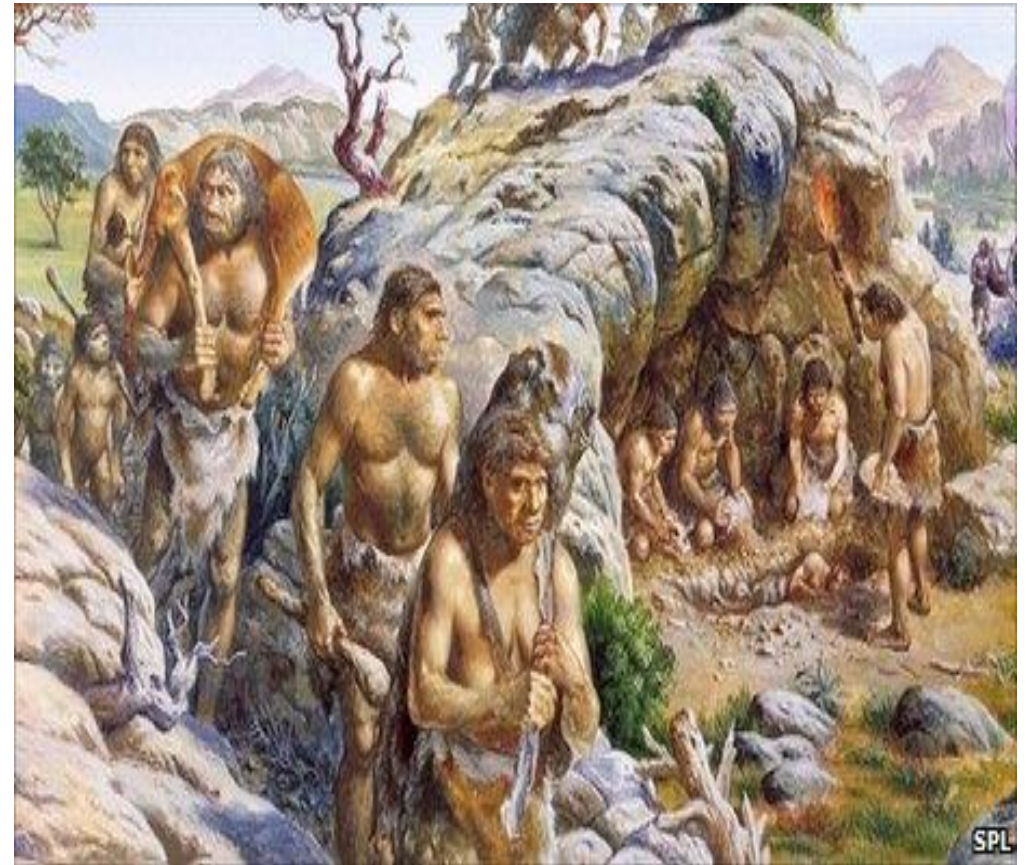
Indonesia bumi
ciptaan Tuhan dengan keindahan dan kekayaan
alam yang **luar biasa.**

INDONESIA surga dunia.....





Ketika bangsa Eropa....





Sudah makmurkah rakyat Indonesia?



INDONESIA SAAT INI.....



Kenyataannya saat ini...
SUDAH SEJAHTERAKAH KITA ? ...



Mengapa kekayaan yang dimiliki negara
Indonesia belum bisa membuat rakyat
Indonesia makmur?



Potret suram anak
bangsaku





KORUPSI...

Dulu:

Bermula dari penjara...
berakhir menjadi pejabat negara....



Bung Karno dan Sam Ratulangi

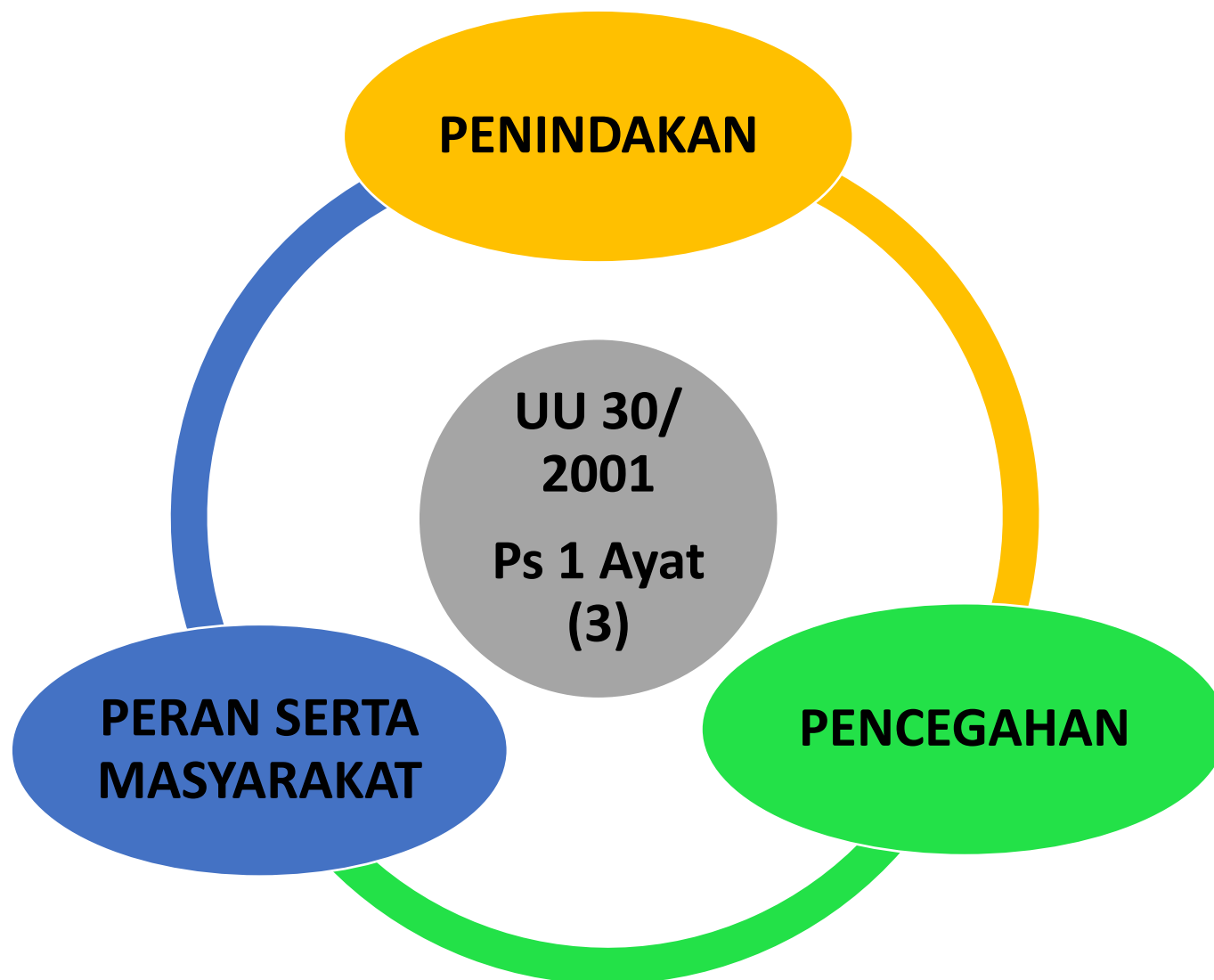
Sekarang:

Bermula dari pejabat negara..
....dan berakhir di Penjara



Pemberantasan Korupsi

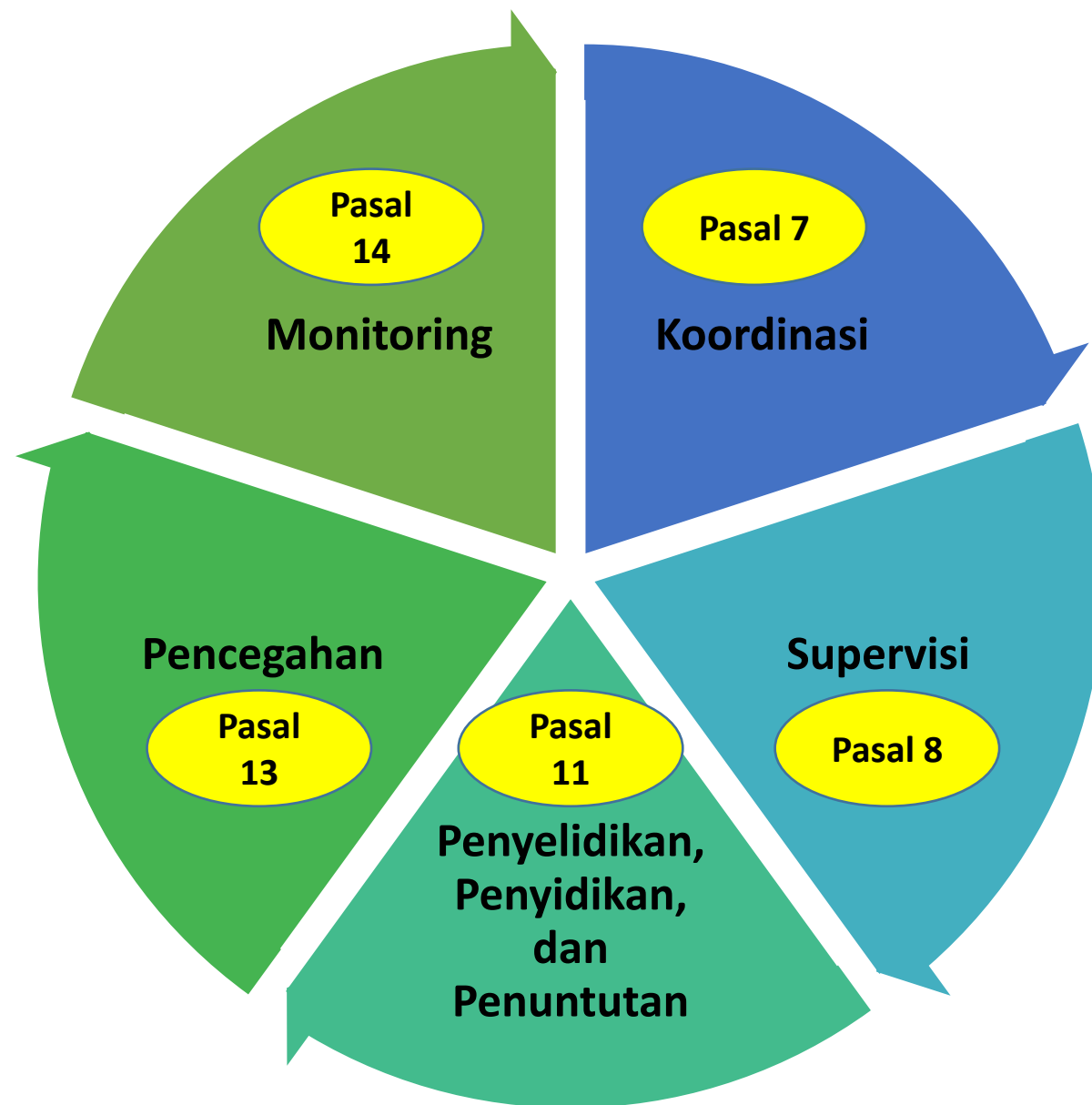
serangkaian tindakan untuk **mencegah** dan **memberantas** tindak pidana korupsi melalui upaya **koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan**, dengan **peran serta masyarakat** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TUGAS DAN FUNGSI KPK

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.



- *networking* → *counterpartner*
- tidak memonopoli tugas dan wewenang lid-dik-tut;
- *trigger mechanism*

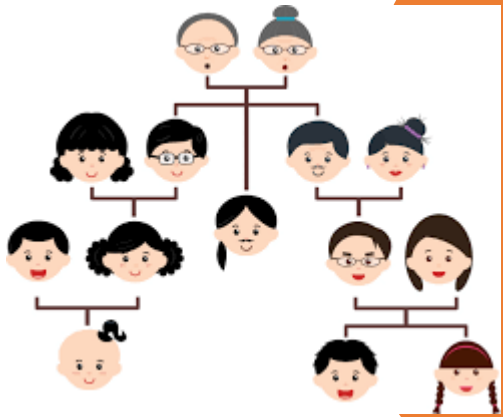


237 orang (36,4%)

dari 670 Pelaku Korupsi yang ditangani KPK
adalah kader politik

(Anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah & Kepala Lembaga)
Akhir 2017

MODUS KORUPSI SAAT INI



**Melakukan
Korupsi
Bersama**

- Suami - Istri
- Ayah/ Ibu – Anak
- Kolaborasi dg kerabat lain (Adik/ Kakak, Ipar, Mertua/ menantu, dst)



**Melibatkan
Keluarga sbg
Sarana
Pencucian Uang**

- Rekening Bank/ Sekuritas
- Polis Asuransi
- Investasi/ Aset



MACAM KORUPSI

(Berdasarkan Motif Perbuatan)

K
O
R
U
P
S
I

- Corruption by **G**reed

Terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi

- Corruption by **O**pportunities

Terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi

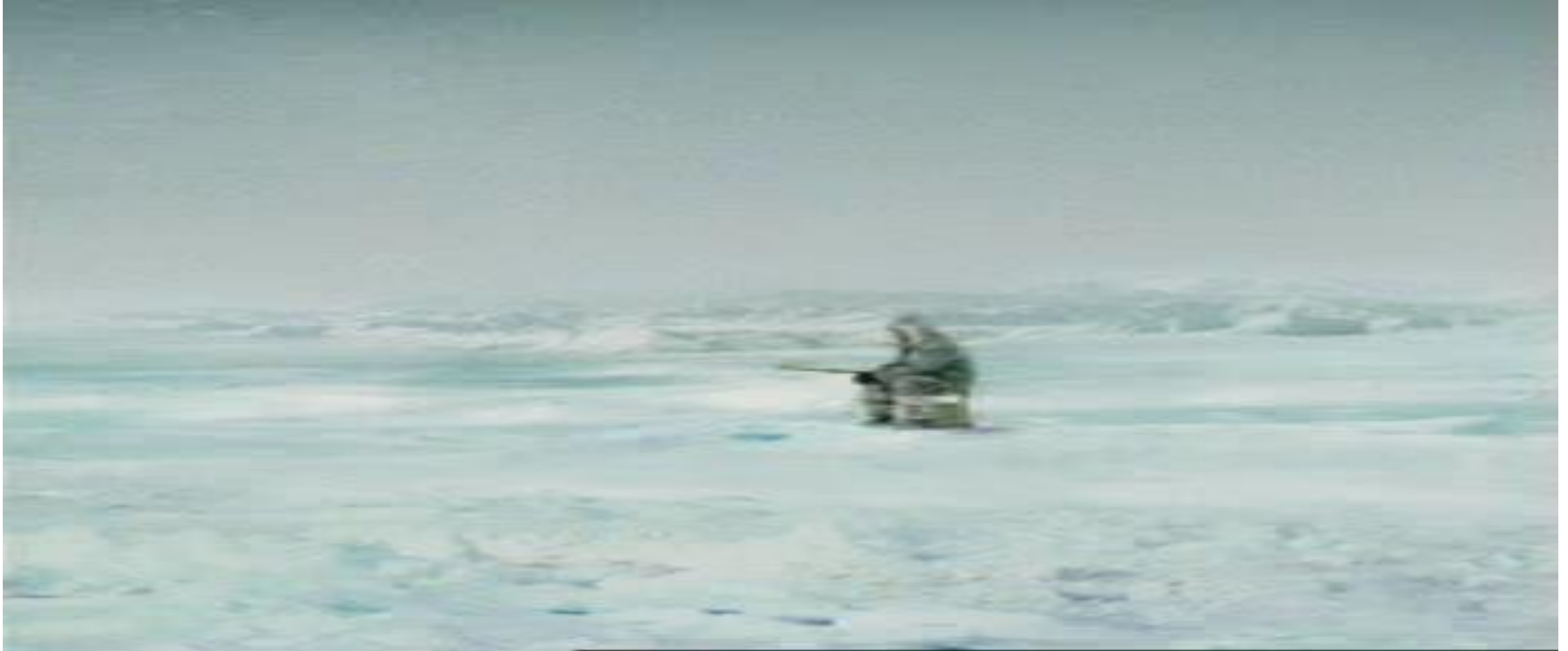
- Corruption by **N**eed

Berhubungan dengan sikap mental yg tdk pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai.

- Corruption by **E**xposures

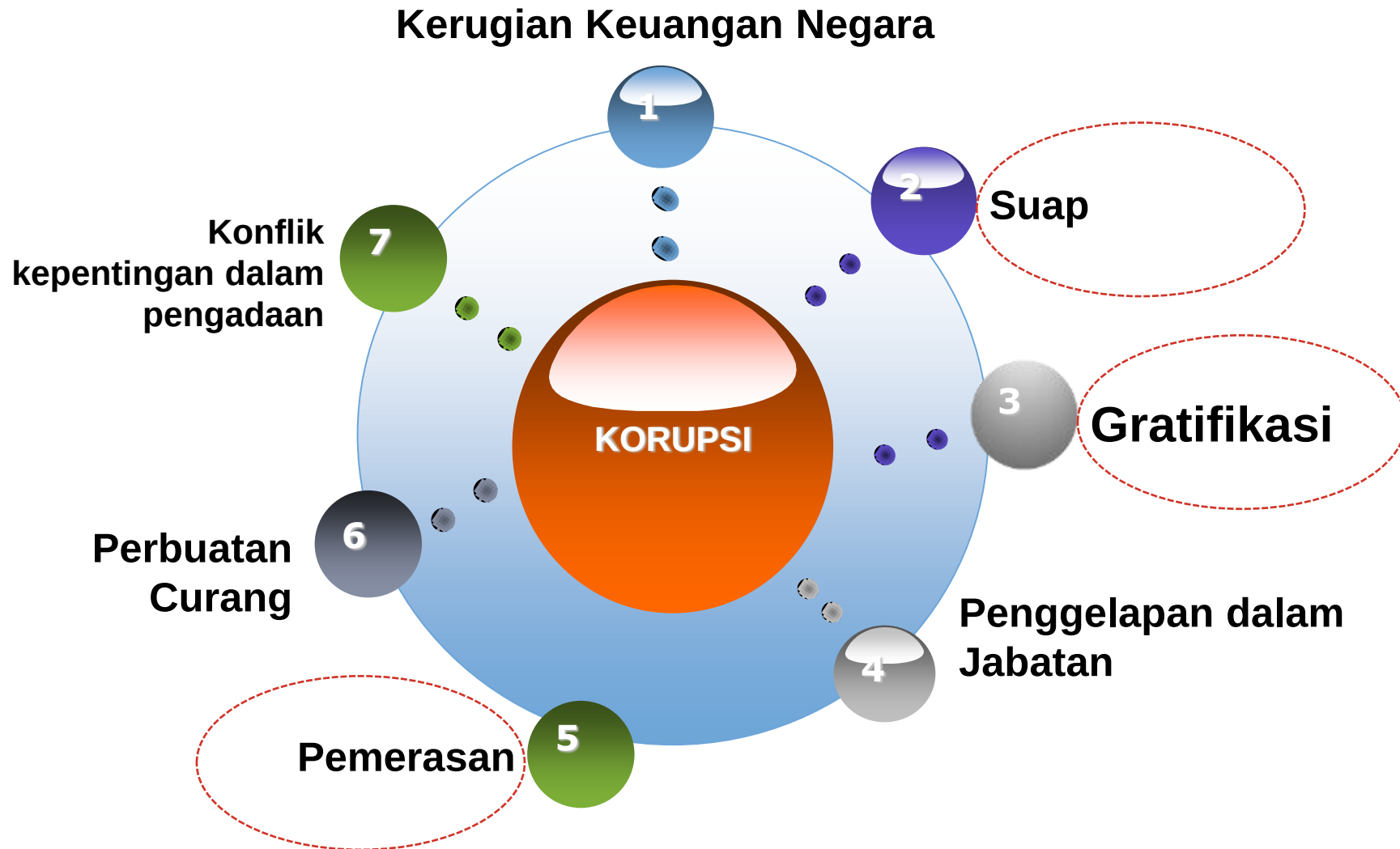
Berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah

Pentingnya Mengenal risiko



7 KLASIFIKASI KORUPSI

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001



Suap..

Pemerasan..

Gratifikasi..

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



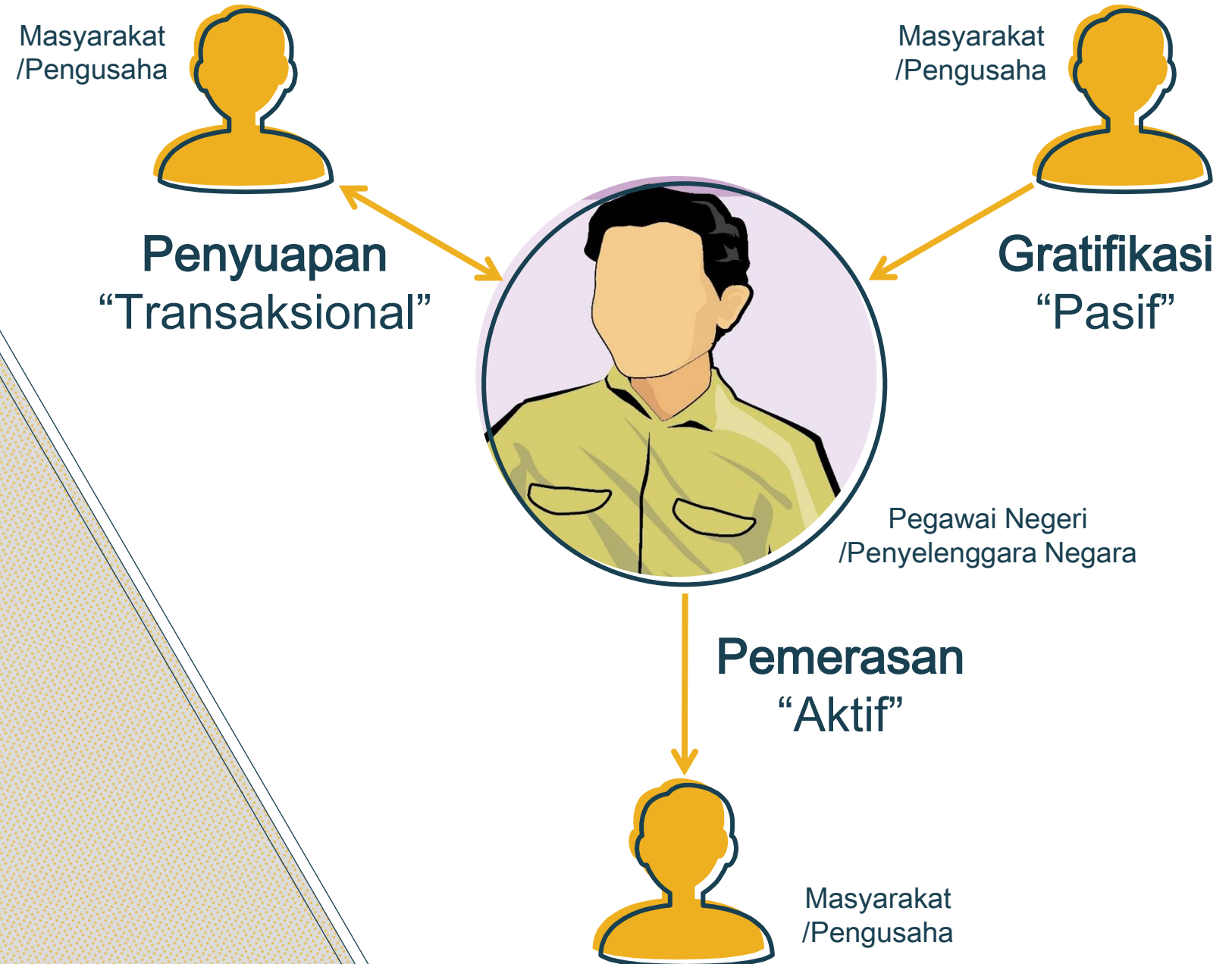
PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender



Perbedaan Pemerasan, Suap, dan Gratifikasi



© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com

PENYUAPAN

PERMISIVE UNTUK
MELAKUKAN
SESUATU

PERMISIVE UNTUK
MEMINTA

PEMERASAN

PERMISIVE
MENERIMA

GRATIFIKASI

Definisi Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan **fasilitas lainnya**.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)

KBBI

- **gra·ti·fi·ka·si** *n*
- uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan

Blacks Law Dictionary

- *A gratuity; a recompense or reward for services or benefits, given voluntarily, without solicitation or promise*

Gratifikasi Illegal?

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UNSUR PASAL 12 B AYAT (1) UU 20/2001

- ◇ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- ◇ Menerima Gratifikasi
- ◇ Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya
- ◇ Penerimaan Gratifikasi Tidak Dilaporkan kepada KPK dalam Jangka Waktu 30 Hari Kerja Sejak Diterimanya Gratifikasi



Pegawai Negeri

(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang tentang Kepegawaian

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan
negara atau daerah

Penyelenggara Negara

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara

Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

Menteri

Gubernur

Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku : Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota dll.

PRAKTEK GRATIFIKASI BISA MELALUI :

Keagamaan

Idul Fitri



Natal



Imlek



Tahun Baru



Budaya

Pernikahan



Duka Cita



Khitanan



Kelahiran



Pergaulan

Ulang Tahun



Naik Jabatan



Sakit



Rumah Baru



JENIS PENERIMAAN GRATIFIKASI



Barang



Pinjaman tanpa bunga



Uang / Setara Uang



Perjalanan Wisata



Pengobatan GRATIS

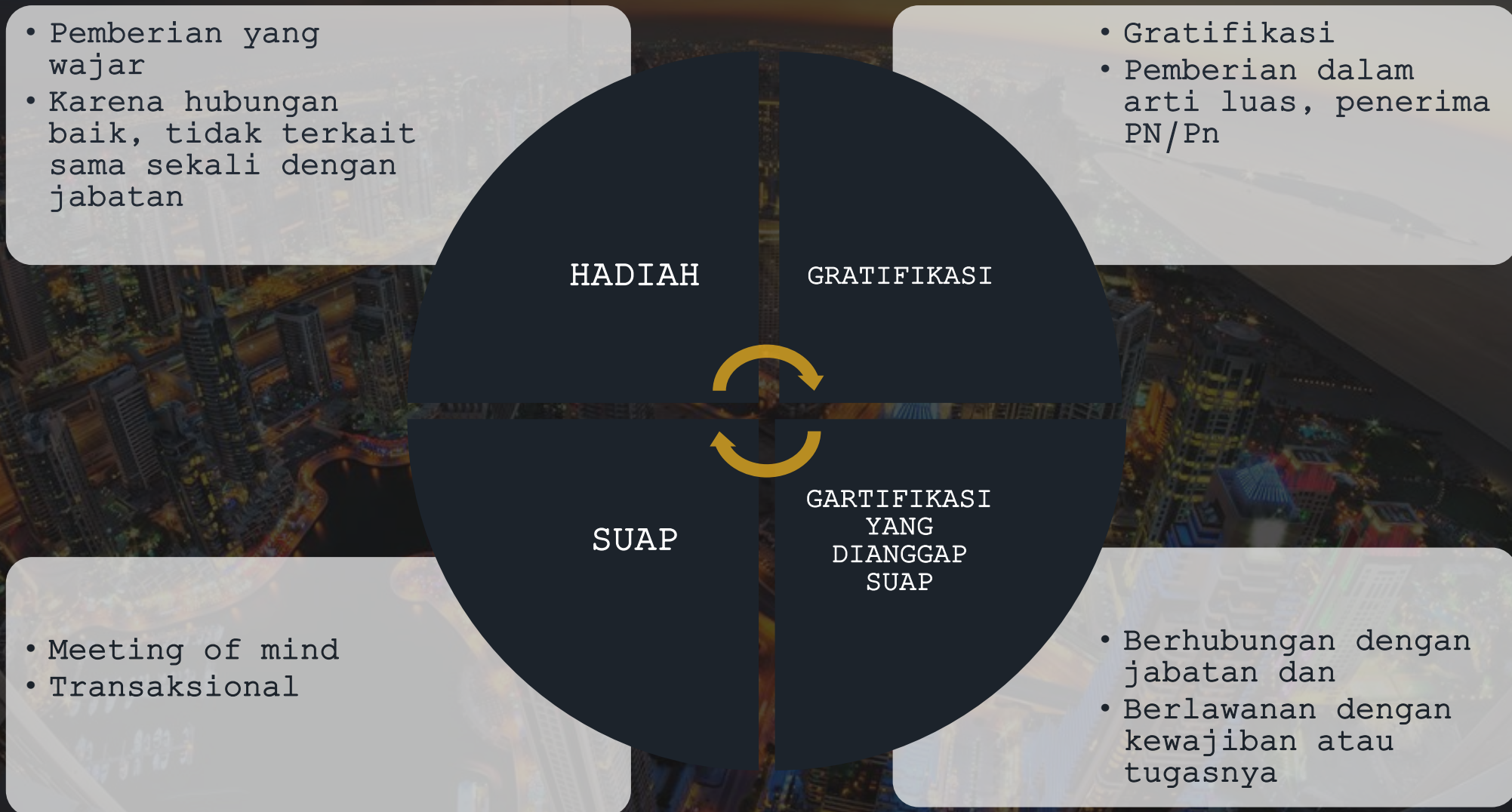


Rabat / Diskon

JENIS PENERIMAAN GRATIFIKASI



Hadiah, Gratifikasi, Suap, Gratifikasi yang Dianggap Suap



SANKSI PENERIMA

Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001



- Pidana Penjara **SEUMUR HIDUP** Paling **SINGKAT 4 TAHUN** dan paling **LAMA 20 TAHUN** dan dipidana denda paling **SEDIKIT Rp. 200 JUTA** paling **BANYAK Rp. 1 MILIAR.**

Sanksi bagi Pemberi Pasal 13 UU No.31/1999



**Pidana Penjara
3 tahun**

&



**Pidana Denda
Rp 150 juta**

SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI SUAP

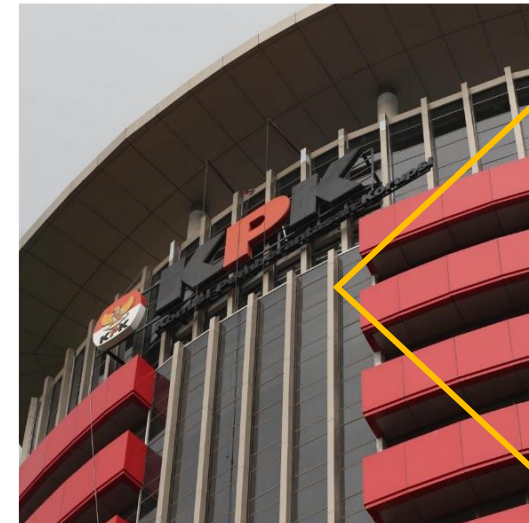


TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut



KATEGORI GRATIFIKASI



GRATIFIKASI YANG WAJIB
DILAPORKAN



GRATIFIKASI YANG TIDAK
WAJIB DILAPORKAN

CONTOH GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

GRATIFIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

CONTOH GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

GRATIFIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS

1. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang
2. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;.
4. Dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan telah dikenal sebelumnya pada Surat Edaran KPK B-1341 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi



GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ D I L A P O R K A N ✕

1

Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.



Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta

Rupia

2

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**

✕ DILAPORKAN ✕



Penerimaan terkait dengan musibah atau bencana maksimal Rp 1 juta per pemberi

3



Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp 1 juta dalam 1 th dari pemberi yang sama.

4

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**

✕ DILAPORKAN ✕

5



Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

6



Hidangan atau sajian yang berlaku umum.

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ D I L A P O R K A N ✕

7

Prestasi akademis /non akademis yang diikuti dengan biaya **sendiri**, seperti kejuaraan, perlombaan /kompetisi tidak terkait kedinasan.



8

Keuntungan /bunga dari penempatan dana, **investasi**, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku **umum**;



GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

9

Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan **keanggotaan** yang berlaku umum.



10

Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum.

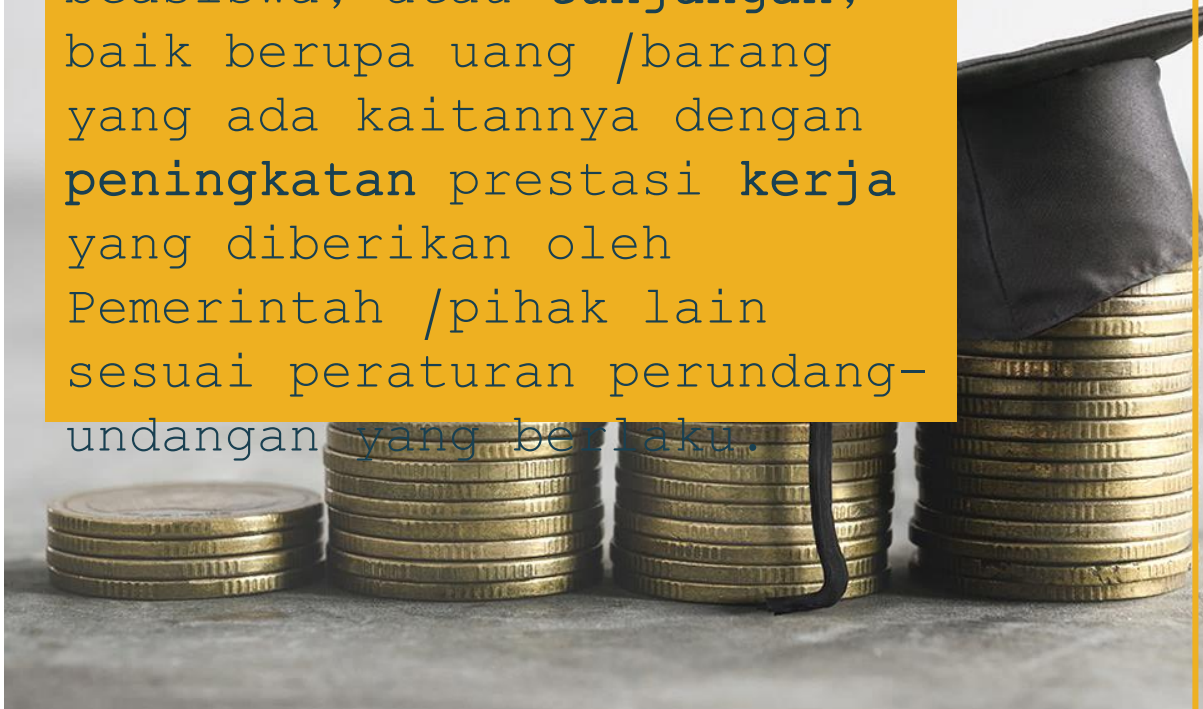


GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**

✕ D I L A P O R K A N ✕

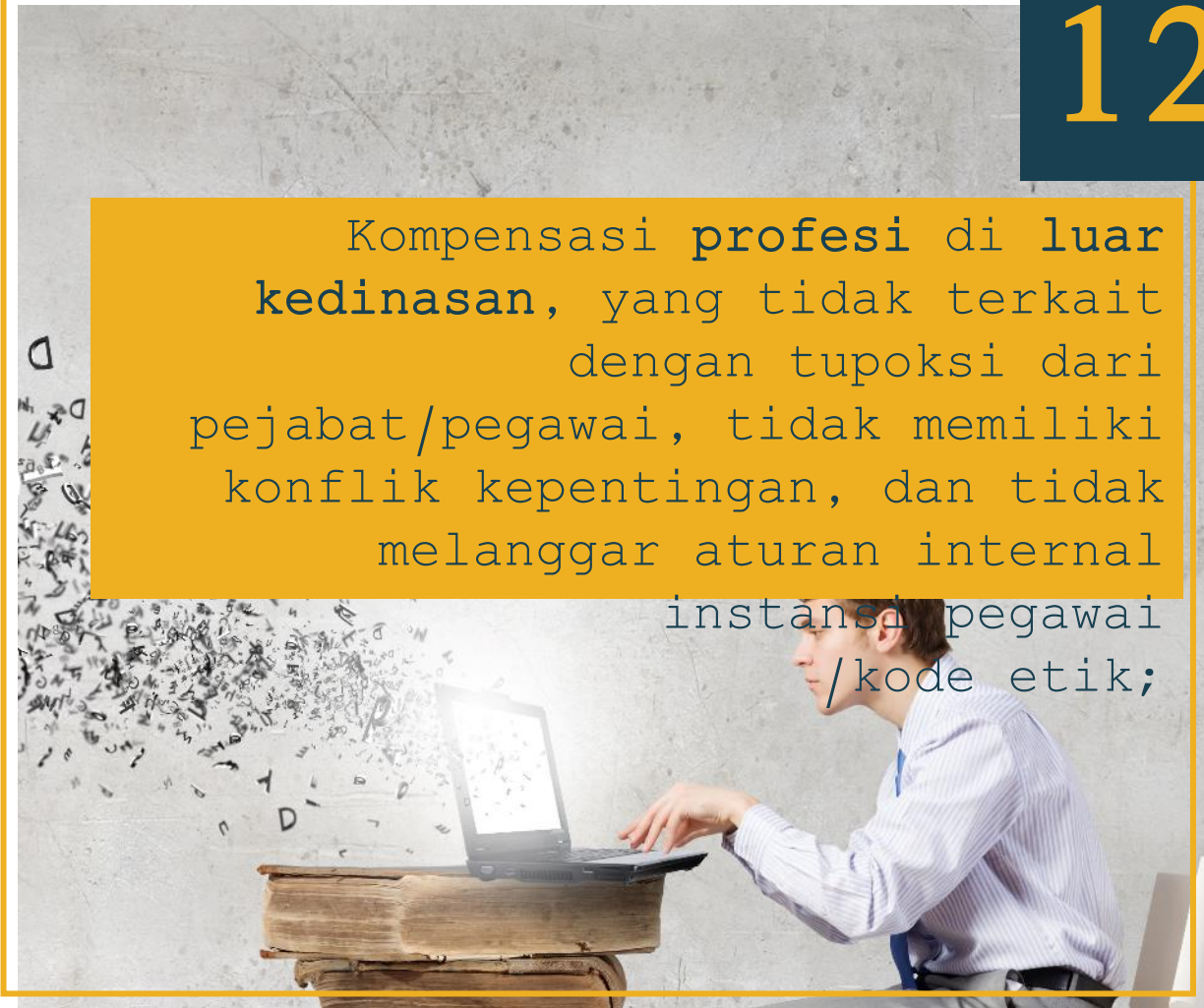
11

Penerimaan hadiah, beasiswa, atau **tunjangan**, baik berupa uang /barang yang ada kaitannya dengan **peningkatan prestasi kerja** yang diberikan oleh Pemerintah /pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



12

Kompensasi **profesi** di luar **kedinasan**, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai /kode etik;



CARA

PELAPORAN



GRATIFIKASI

Datang langsung ke



Gedung
Merah Putih
KPK
Jl. Kuningan
Persada,
Jakarta
Selatan



E-
mail

Mengisi formulir di
<http://kpk.go.id/gratifikasi> pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

<http://gol.kpk.go.id/>



UPG



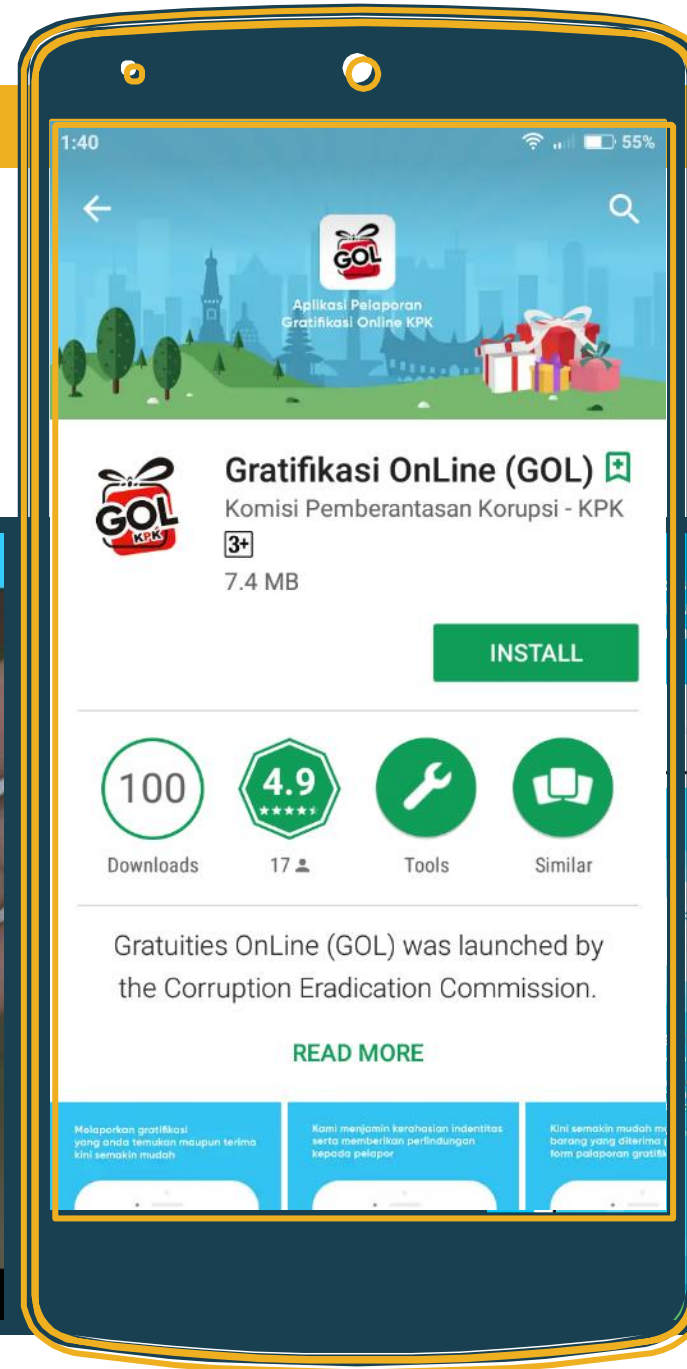
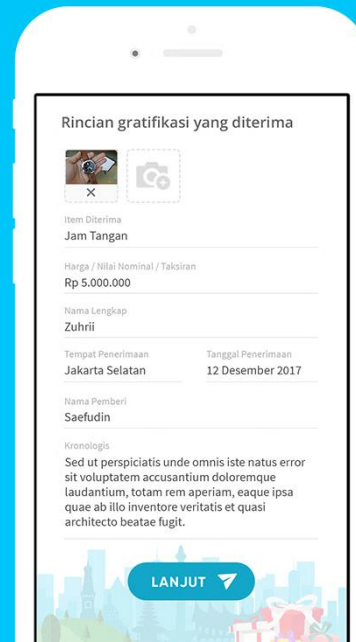
APLIKASI MOBILE



Melaporkan gratifikasi yang anda temukan maupun terima kini semakin mudah



Kini semakin mudah mengisi detail barang yang diterima pada form palaporan gratifikasi



Bagat berperan ang upaya korupsi di Indonesia



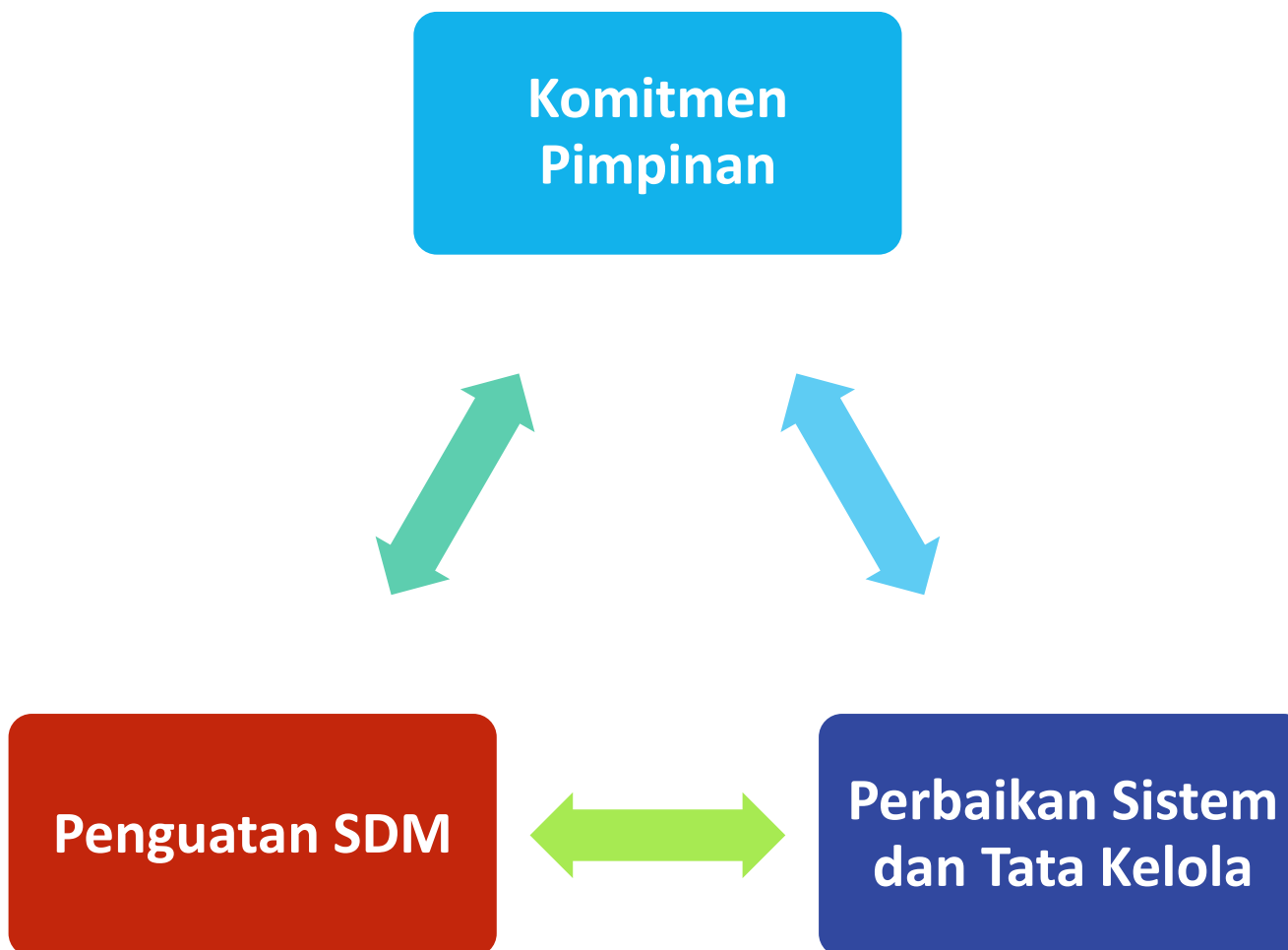
Riwayat laporan akan tersimpan pada akun



BELAJAR DARI PENGUIN



Bagaimana Mencegah Korupsi di Pemda ?



MONITORING KEGIATAN KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN (Data Per November 2017)

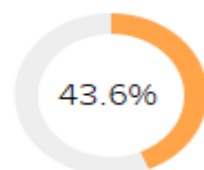


AREA INTERVENSI KORSUPGAH

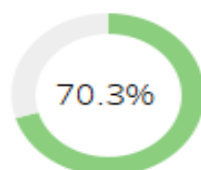
Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dibagi menjadi 6 (enam) area intervensi sebagai berikut:

Ket: ■ Not Started ■ >30% ■ >70% ■ Complete
■ >0% ■ >50% ■ >90%

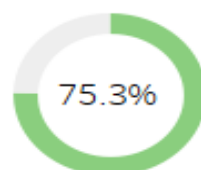
PENGELOLAAN APBD



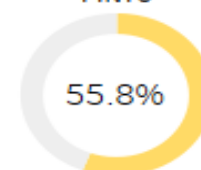
PENGADAAN BARANG DAN JASA



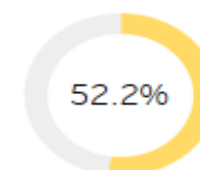
E-SAMSAT



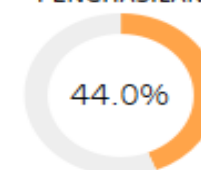
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU



PENGUATAN APIP



TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN



SEBARAN WILAYAH KORSUPGAH

KORSUPGAH
53.3%

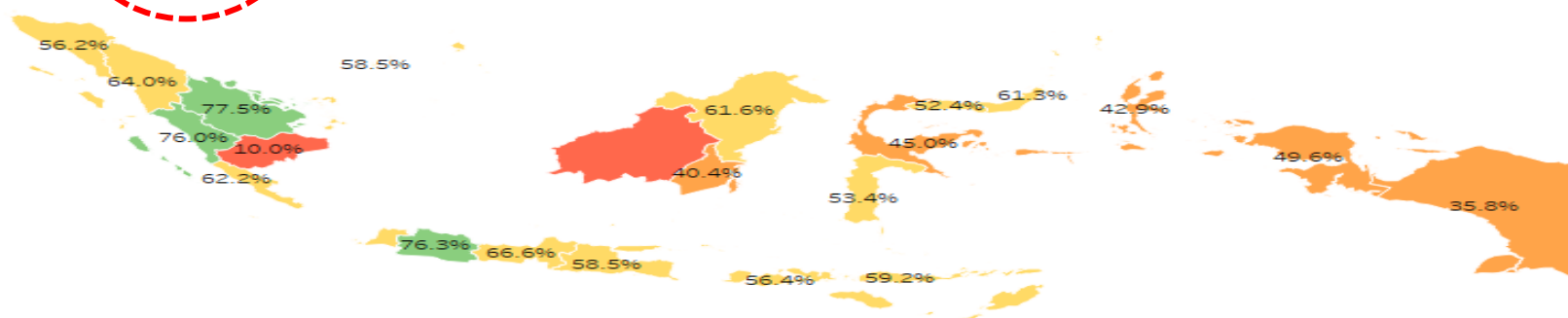
25 Provinsi dari Total 34 Provinsi
73.5% Provinsi

382 Pemda dari Total 548 Pemda
69.7% Pemda

JAMBI
12 Pemda dari Total 12 Pemda
100.0%

PROGRESS PEMDA

1	Pemkot Medan	94.7%
2	Pemprov Sumatera Utara	92.2%
3	Pemprov Jawa Barat	90.5%
4	Pemprov Jawa Tengah	90.4%
5	Pemkot Bandung	89.8%
6	Pemkab Tapanuli Selatan	89.1%
7	Pemkot Padang	89.0%
8	Pemkab Solok	87.3%
9	Pemprov Riau	87.0%
10	Pemkot Semarang	86.9%
11	Pemkab Kampar	86.0%
12	Pemkab Pelalawan	85.9%
13	Pemkot Depok	85.7%
14	Pemkab Siak	85.6%
15	Pemkot Dumai	85.6%



Klik Prov/Kab/Pemda untuk melihat informasinya

9 PROGRAM KORSUPGAH





PENANDATANGANAN
KOMITMEN BERSAMA
PROGRAM
PEMBERANTASAN
KORUPSI TERINTEGRASI
DI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR
YG DISAKSIKAN OLEH PIMPINAN KPK,
KAPOLDA, KAJATI, BPKP JATIM
TGL 7 MARET 2018

KOMITMEN BERSAMA

1. Melaksanakan Proses Perencanaan dan Penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi *e-planning* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*.
2. Mengoptimalkan proses Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) serta menjamin kemandirian Unit Layanan Pengadaan (ULP).
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik.
4. Melaksanakan tata kelola Dana Desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.
5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Membangun Sistem Pengendalian Gratifikasi dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.
7. Melakukan pembaruan peraturan LHKPN dan membentuk Unit Pengelola LHKPN.
8. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
9. Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja.
10. Melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan akuntabel dalam hal pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan fisik dan hukum serta pelaporan.
11. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan liar, khususnya di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Perizinan, Perhubungan, dan pelayanan masyarakat lainnya.
12. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik dan penggalian potensi pendapatan serta penegakan aturan, termasuk penagihan piutang-piutang pendapatan yang belum terealisasi.
13. Melaksanakan Rencana Aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

KRITERIA KEBERHASILAN

- Tersedianya aplikasi perencanaan APBD
- Terdokumentasinya Musrenbang, Pokir DPRD, dan Forum SKPD
- Program dan Kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD
- Digunakannya Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB)
- Tersedianya aplikasi penganggaran APBD
- Integrasi Perencanaan dengan Penganggaran

Perencanaan dan Penganggaran APBD



- Pendelegasian kewenangan (100% dilimpahkan ke DPMPTSP)
- Transparansi Informasi (1. Jenis; 2. Lama; 3. Biaya (Retribusi); 4. Syarat; 5. Pengaduan)
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis difasilitasi oleh DPMPTSP
- Tersedia Tracking System
- Tersedia Kanal Pengaduan
- Lokasi dan Tempat Layanan
- Ketersediaan Aturan (1. Perkada Pelimpahan Kewenangan; 2. Perkada SOP Perizinan; 3. Kode Etik)
- Penerapan e-Signature
- Pemenuhan Kewajiban Pemohon Perizinan (1. Direktorat Jenderal Pajak (KSWP); 2. Badan Pendapatan Daerah; 3. BPJS Ketenagakerjaan)
- Integrasi dengan Aplikasi K/L (Contoh: SPIPISE, SIPO)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



KRITERIA KEBERHASILAN

- Organisasi Mandiri
- Pokja Permanen
- Kematangan ULP
- Standar LPSE
- Penerapan Pengadaan e-Katalog
- RUP ditayangkan tepat waktu
- Proses pengadaan dilakukan di ULP
- Perangkat Pendukung

Pengadaan Barang dan Jasa



- Kecukupan Jumlah SDM
- Kepatuhan Anggaran
- Level Kapabilitas
- % Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Peningkatan Kapabilitas APIP



KRITERIA KEBERHASILAN

- Publikasi Dana Desa (1. RAPBDes; 2. Penggunaan Dana Desa; 3. Pertanggungjawaban Dana Desa)
- Transparansi Prosentase Dana Desa yang menggunakan SISKEUDES
- Pelibatan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa
- Prosentase desa yang sudah dilakukan audit oleh inspektorat berdasarkan PKPT
- Tersedianya : 1.Perencanaan APBDes, 2.Pelaksanaan APBDes, 3.Penatausahaan Keuangan Desa, 4. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes, 5.Laporan Pertanggungjawaban APBDes
- Tersedianya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Desa tentang penetapan APB Desa dan besaran Dana Desa

Dana Desa



- Implementasi TPP
- Kepatuhan LHKPN (Regulasi, Unit LHKPN, Pelporan)
- Kepatuhan Gratifikasi (Regulasi, Unit LHKPN, Pelporan)

Manajemen ASN



KRITERIA KEBERHASILAN

- Adanya database WP yang handal
- Penerapan Tax Clearance
- Dukungan Regulasi

Optimalisasi Pendapatan Daerah



- Tersedianya Sistem Pencatatan terkait BMD yang Handal
- Pemanfaatan BMD sesuai Aturan Perundangan
- Adanya Aturan Pemindahtanganan yang Sesuai Aturan yang Berlaku

Manajemen Aset Daerah



SEKTOR STRATEGIS

- Terpublikasikannya informasi secara berkala tentang anggaran dan kegiatan sektor pendidikan
- Tersedianya regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan dinas dan satuan bidang pendidikan
- Tersedianya sistem/media pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan dan mekanisme tindak lanjutnya
- Terimplementasikannya mekanisme monitoring penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan masyarakat
- Terselenggaranya PPDB secara online
- Terselenggaranya pendidikan antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan
- Tersedianya data kependidikan yang akurat secara berkala

Pendidikan



- Tersedianya dan terpublikasikannya data kepesertaan BPJS secara akurat
- terselesaikannya masalah administrasi kependudukan
- Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat
- Tersedianya sistem pengaduan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat dan ditindaklanjuti
- Tersedianya standar pelayanan kesehatan minimal yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
- Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku

Kesehatan



SEKTOR STRATEGIS

- Kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan kontrak
- Terpublikasikannya informasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Infrastruktur



- Tertatanya izin-izin usaha pertambangan
- Terlaksananya kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
- Terlaksananya pengawasan produksi pertambangan minerba
- Terlaksananya pengawasan pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
- Terlaksananya pengawasan penjualan/pengapalan hasil tambang minerba
- Terlaksananya pengawasan reklamasi dan pasca tambang

Pertambangan



SEKTOR STRATEGIS

- Terkonsolidasinya data dan peta perizinan perkebunan kelapa sawit
- Tersediannya data realisasi plasma dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Semua perkebunan rakyat ter STDB kan
- Terimplementasinya kebijakan satu peta perkebunan kelapa sawi
- Terpungutnya seluruh potensi pajak di sektor komoditas kelapa sawit
- Terbangunan database konflik lahan di area perizinan sawit dan mekanisme penyelesaian konflik lahan
- Teridentifikasinya spot karhutla
- Tidak ada perusahaan pemegang izin perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajibannya

Perkebunan



- Tersediannya data dan informasi penggunaan kawasan hutan.
- Tertatannya izin-izin lingkungan

Kehutanan



SEKTOR STRATEGIS

- Tersusunnya Tata Ruang Wilayah Laut (RZWP3K)
- Tertatanya Izin Perikanan Tangkap
- Terlaksananya Kewajiban Para Pihak

Kelautan dan Perikanan



PERAN PEJABAT PUBLIK DAN PNS

- 1. Menolak segala bentuk korupsi dan TPPU serta berani melaporkan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi**
- 2. Menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan**
- 3. Melaporkan Harta Kekayaan secara jujur dan benar.**
- 4. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.**



- Sesungguhnya, pada **ranah preventif**, upaya pemberantasan korupsi sangat tergantung pada **kemauan (komitmen) pimpinan pemerintahan (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota)**, dan jajarannya.



**TERIMA KASIH
MATUR NUWUN**

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:

Direktorat Pengaduan Masyarakat

PO BOX 575 Jakarta 10120

Telp: (021) 2557 8389

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Email: pengaduan@kpk.go.id

Pelaporan Gratifikasi:

Direktorat Gratifikasi

Telp: (021) 2557 8440

Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Pelayanan Informasi Publik:

Hubungan Masyarakat:

Telp: (021) 2557 8498

Faks: (021) 5290 5592

Email: informasi@kpk.go.id

**Informasi Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN):**

Direktorat LHKPN

Telp: (021) 2557 8396

Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id